

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori *Agency*

Teori *agency* pertama kali dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menjelaskan hubungan kontraktual antara dua pihak, yaitu *principal* (pemilik atau pemegang saham) dan *agent* (manajer atau pengelola perusahaan). Dalam hubungan ini, pemilik memberikan wewenang kepada manajer untuk mengelola sumber daya perusahaan dan membuat keputusan. Pada praktiknya, ketidaksamaan kepentingan antara kedua belah pihak sering muncul dan dapat memicu terjadinya konflik keagenan (Sony et al., 2009).

Konflik tersebut muncul karena adanya asimetri informasi, di mana pihak manajemen memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi, prospek, dan risiko perusahaan dibandingkan pemilik modal (Chairina & Tjahjadi, 2023). Kondisi ini dapat mendorong manajer untuk bertindak sesuai dengan kepentingan pribadinya, seperti memanipulasi kinerja keuangan perusahaan atau mengambil keputusan yang tidak sepenuhnya menguntungkan pemegang saham. Oleh karena itu, teori *agency* menekankan pentingnya mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa manajer bertindak sejalan dengan kepentingan pemilik.

Dalam konteks ini, penerapan *corporate governance* menjadi salah satu strategi penting untuk mengurangi konflik keagenan. Mekanisme *corporate governance* yang baik berfungsi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian internal perusahaan, termasuk dalam hal pengungkapan

informasi lingkungan dan sosial melalui *sustainability report*. Dengan adanya pengawasan dari dewan komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit, diharapkan manajemen terdorong untuk bertindak lebih etis dan terbuka, sehingga dapat memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan serta mendukung keberlanjutan perusahaan.

2.2. Teori *Legitimacy*

Perusahaan yang berorientasi pada keberlanjutan tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan ekonomi, tetapi juga berupaya mempertahankan citra dan legitimasi di mata publik agar memperoleh dukungan serta penerimaan dari masyarakat (Suchman, 1995). Teori ini memandang bahwa legitimasi merupakan sumber daya yang penting bagi kelangsungan hidup perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan berusaha menyesuaikan nilai, norma, serta perilakunya agar selaras dengan harapan sosial dan lingkungan tempat perusahaan beroperasi. Kesesuaian ini menjadi bentuk strategi organisasi untuk memperoleh kepercayaan publik dan meminimalkan potensi konflik dengan pemangku kepentingan.

Salah satu mekanisme yang digunakan perusahaan untuk memperoleh dan mempertahankan legitimasi adalah melalui pengungkapan keberlanjutan dalam bentuk *sustainability report*. Melalui laporan ini, perusahaan berusaha menunjukkan komitmen terhadap tanggung jawab sosial, lingkungan, dan ekonomi sebagai wujud transparansi dari aktivitas operasi bisnis. Oleh karena itu, penyusunan *sustainability report* tidak hanya menjadi kewajiban regulatif, tetapi juga strategi komunikasi perusahaan untuk memperkuat legitimasi di mata masyarakat.

2.3. Sustainability Report

2.3.1. Definisi Sustainability Report

Sebagai bentuk pelaporan non-keuangan, *sustainability report* digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai kinerja perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Menurut *Global Reporting Initiative* (GRI) mendefinisikan laporan yang disusun oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang timbul dari aktivitas operasionalnya, serta menunjukkan kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Laporan ini menjadi instrumen penting bagi perusahaan untuk menunjukkan komitmen terhadap prinsip *transparency* dan *accountability* dalam pengelolaan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab.

Sustainability report juga berfungsi sebagai sarana komunikasi antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan, guna membangun kepercayaan, memperkuat reputasi, dan memastikan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang (Eko & Wuryan, 2021). Di Indonesia, kewajiban pengungkapan *sustainability report* telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 yang mewajibkan lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik untuk melaporkan kinerja keberlanjutan secara periodik.

2.3.2. Prinsip Pengungkapan Sustainability Report

Dalam penyusunannya, *sustainability report* di Indonesia harus berpedoman pada prinsip pelaporan yang ditetapkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI) agar informasi yang disajikan dapat dipercaya, relevan, dan dapat dibandingkan

antarperiode. Menurut GRI 2021 (Permatasari, 2021), terdapat beberapa prinsip utama dalam pengungkapan *sustainability report*, yaitu akurasi, keseimbangan, kejelasan, ketepatan waktu, keterbandingan, dan keandalan. Prinsip akurasi menuntut agar setiap informasi yang disajikan menggambarkan kondisi aktual perusahaan secara tepat dan terukur, sehingga tidak menimbulkan kesalahan interpretasi.

1. Keseimbangan

Menekankan perlunya penyajian informasi secara objektif, baik mengenai keberhasilan maupun tantangan yang dihadapi perusahaan dalam aspek keberlanjutan.

2. Kejelasan

Memastikan bahwa laporan mudah dipahami oleh pembaca dari berbagai latar belakang.

3. Ketepatan waktu

Menegaskan pentingnya penyampaian informasi sesuai periode pelaporan agar tetap relevan bagi pengambilan keputusan.

4. Keterbandingan

Memungkinkan pengguna laporan untuk menilai kinerja perusahaan dari waktu ke waktu atau dibandingkan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama.

5. Keandalan

Menekankan bahwa data dan informasi yang disajikan harus dapat diverifikasi dan berasal dari sumber yang kredibel.

2.4. *Corporate Governance*

2.4.1. Definisi *Corporate Governance*

Berdasarkan *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), *Corporate Governance* adalah:

“suatu sistem pengendalian perusahaan yang tersusun atas seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan lainnya, baik internal maupun eksternal, terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Penerapan sistem ini bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi seluruh *stakeholder*..”

Penerapan *Corporate Governance* dapat berperan penting untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi perusahaan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selain itu, baik berfungsi untuk mencegah terjadinya kesalahan signifikan dalam perumusan maupun pelaksanaan strategi perusahaan, sehingga arah kebijakan perusahaan tetap sejalan dengan tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan (Sedarmayanti, 2012). *Corporate governance* diperlukan untuk meningkatkan aktivitas operasional yang efisien, transparan dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan. Prinsip dan pedoman bagi perusahaan untuk menjalankan praktik bisnis yang beretika, efektif, serta berorientasi pada keberlanjutan meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, keadilan (Swandari & Hadi, 2021).

2.4.2. Prinsip *Corporate Governance*

Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kelima prinsip *corporate governance* dapat diterapkan secara konsisten pada seluruh aspek kegiatan operasional. Hal ini bertujuan agar setiap kegiatan perusahaan tidak

hanya berfokus pada pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan, sosial, dan masyarakat sekitar. Terdapat 5 prinsip utama yang menjadi dasar implemementasi *corporate governance*, meliputi (Sony et al., 2009):

1. *Transparency*

Keterbukaan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan. Hal ini bertujuan agar informasi mengenai kinerja dan akuntabilitas dapat dinilai secara objektif.

2. *Accountability*

Kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban setiap partisipan perusahaan. Setiap pihak dalam perusahaan menjalankan tugas sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing.

3. *Responsibility*

Perusahaan diharapkan mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Mencerminkan komitmen perusahaan terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan.

4. *Independency*

Independensi merujuk pada setiap partisipan perusahaan bebas dari intervensi pihak lain dalam pengambilan keputusan. Menjalankan fungsinya sesuai profesionalisme dan kepentingan terbaik perusahaan.

5. *Fairness*

Menekankan pentingnya memperhatikan perlakuan yang setara terhadap seluruh pemangku kepentingan. Hal ini dilakukan untuk menciptakan

hubungan yang harmonis dengan pihak yang terkait secara adil dan proporsional.

2.5. Dewan Komisaris Independen

Anggota dewan komisaris independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan, atau hubungan pribadi dengan pihak manajemen maupun pemegang saham, sehingga dapat bersifat objektif dalam memberikan penilaian serta pengawasan terhadap jalannya perusahaan (Ng Suwandi, 2019). Berperan untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawab terhadap kebijakan dan kinerja manajemen perusahaan. Independensi menjadi aspek penting agar pengambilan keputusan berjalan secara transparan dan bebas dari kepentingan tertentu yang dapat merugikan perusahaan. Berdasarkan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 Pasal 20 ayat (3) yang mewajibkan jumlah komisaris independen paling kurang 30% dari seluruh anggota dewan komisaris. Keberadaan komisaris independen diharapkan mampu meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan pemangku kepentingan, terutama dalam aspek tanggung jawab sosial dengan pengungkapan informasi dalam bentuk *sustainability report*.

Dalam penelitian ini, dewan komisaris independen diukur berdasarkan proporsi jumlah komisaris independen terhadap total anggota dewan komisaris. Proporsi mencerminkan sejauh mana perusahaan menerapkan prinsip *corporate governance*. Semakin besar proporsi komisaris independen, maka akan semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam menjalankan fungsi pengawasan yang efektif terhadap kinerja manajemen. Oleh karena itu, berpotensi mendorong perusahaan

untuk mengungkapkan informasi keberlanjutan secara lebih luas dan objektif, untuk menjaga kredibilitas serta reputasi di mata para pemangku kepentingan dan publik.

2.6. Dewan Direksi

Dewan direksi merupakan organ perusahaan yang berperan penting dalam menjalankan operasional perusahaan dan memiliki kewenangan untuk mewakili perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar POJK No.33/POJK.04/2014 (Otoritas Jasa Keuangan, 2014). Berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan, setiap tindakan yang dilakukan dewan direksi wajib berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan perundang-undangan. Selain itu, efektivitas dewan direksi menjadi faktor penting untuk memastikan keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang.

Jumlah anggota dewan direksi yang cukup besar memiliki keberagaman dalam keahlian dan pengalaman, sehingga memperkuat proses pengawasan serta meningkatkan kualitas pengungkapan informasi, termasuk pengungkapan *sustainability report*. Fungsi pengelolaan perusahaan dewan direksi tidak hanya berfokus pada pengambilan keputusan strategis, tetapi juga mencakup 5 tugas utama yaitu kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal, komunikasi dan tanggung jawab sosial (Swandari & Hadi, 2021). Oleh karena itu, kinerja dewan direksi yang dilandasi kelima fungsi tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*.

2.7. Komite Audit

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55 tahun 2015, Komite audit dibentuk dan bertanggung jawab langsung kepada dewan komisaris dalam membantu pelaksanaan tugas serta fungsinya. Sebagai komite yang berada di bawah dewan komisaris, komite audit memiliki tanggung jawab untuk membantu dalam menjalankan fungsi pengawasan, terkait proses pelaporan keuangan dan pelaksanaan audit internal maupun eksternal (Otoritas Jasa Keuangan, n.d.). Keberadaan komite audit berkontribusi dan mendukung prinsip *corporate governance* dalam menciptakan sistem yang transparan terhadap informasi sosial dan lingkungan yang dapat dipublikasikan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap pemangku kepentingan (Tobing et al., 2019).

2.8. Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan ukuran kinerja perusahaan yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki selama periode tertentu (Nugroho & Sunarya, 2024). Tingkat profitabilitas yang tinggi menunjukkan perusahaan mampu mengelola aset dan modal secara efisien untuk memperoleh keuntungan maksimal dan digunakan untuk menjalankan kegiatan sosial dan lingkungan kepada masyarakat sebagai tanggung jawab perusahaan dalam bentuk *sustainability report*.

Dalam penelitian ini, rasio profitabilitas akan diukur menggunakan *Return on Asset* (ROA) adalah salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan aset yang dimiliki untuk menghasilkan

laba. Rasio ini menunjukkan seberapa besar keuntungan bersih yang dapat diperoleh dari setiap aset yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Semakin tinggi ROA, semakin baik perusahaan menggunakan aset untuk menghasilkan laba.

2.9. Penelitian Terdahulu

Terdapat penelitian *corporate governance* yang telah dilakukan sebelumnya dengan menggunakan variabel dan periode penelitian yang berbeda-beda. Penelitian Listiani & Fadjar (2025) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *sustainability report*, dan sejalan dengan penelitian Handayani et al. (2024) yang menunjukkan dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *sustainability report*. Sedangkan penelitian Sari et al. (2021) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *sustainability report*. Penelitian Chairina & Tjahjadi (2023) menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap *sustainability report*, sedangkan penelitian Rana & Yusnaini (2023) menunjukkan bahwa dewan direksi berpengaruh negatif terhadap *sustainability report*. Peneliti Idawati et al. (2024) menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *sustainability report*, sementara penelitian Handayani et al. (2024) menunjukkan adanya pengaruh positif komite audit terhadap *sustainability report*. Penelitian Sari et al. (2021) menunjukkan bahwa profitabilitas memoderasi kepemilikan manjerial terhadap *sustainability report* tapi tidak memoderasi dewan komisaris independen dan komite audit terhadap *sustainability report*, tidak sejalan dengan penelitian Sitorus et al. (2024)

menunjukkan bahwa profitabilitas dapat memoderasi dewan direksi terhadap *sustainability report*.

Penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi dalam penyusunan penelitian ini. Namun, temuan dari penelitian tersebut masih menunjukkan hasil yang belum konsisten. Ringkasan hasil penelitian terdahulu disajikan dalam

Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2. 1. Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Variabel Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Handayani et al., 2024)	Vaiabel dependen: <i>Sustainability Report</i> Variabel Independen: Profitabilitas, likuiditas, <i>leverage</i> , dewan direksi, komisaris independen, komite audit	Perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI 2017-2021	• Kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap <i>sustainability report</i> • Tata kelola perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>sustainability report</i>
2.	(Hendrati et al., 2023)	Variabel dependen: <i>Sustainability report</i> Variabel Independen: Komite audit, dewan direksi	Perusahaan Jakarta Islamic Index tahun 2017-2021	• Komite audit berpengaruh negatif terhadap <i>sustainability report</i>. • Dewan direksi tidak berpengaruh terhadap <i>sustainability report</i>.

No	Penelitian	Variabel Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
3.	(Listiani & Fadjar, 2025)	Variabel dependen: <i>Sustainability report disclosure</i> Variabel independen: Dewan komisaris independen, komite audit, profitabilitas, Variabel moderasi: Ukuran perusahaan	Perusahaan Bank di Indonesia tahun 2018-2023	- Dewan komisaris independen dan profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap <i>sustainability report</i>. - Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>sustainability report</i>. - Ukuran perusahaan memoderasi secara positif hubungan dewan komisaris independen dan komite audit terhadap <i>sustainability report</i>, tidak memoderasi hubungan profitabilitas terhadap <i>sustainability report</i>.
4.	(Saraswati et al., 2024)	Variabel dependen: <i>Sustainability Reporting</i> Variabel independen: Aktivitas dewan direksi, Independensi dewan komisaris,	Perusahaan sektor pertambangan tahun 2016-2021	Tingkat aktivitas dewan direksi berpengaruh positif terhadap

No	Penelitian	Variabel Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
		ukuran dewan direksi, profitabilitas, <i>leverage</i> , ukuran perusahaan		<i>sustainability report</i> • Ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap <i>sustainability report</i> • Independensi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap <i>sustainability report</i> • Profitabilitas, <i>leverage</i>, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>sustainability report</i>
5.	(Idawati et al., 2024)	Variabel dependen: <i>Sustainability reporting</i> Variabel independen: Independensi dewan direksi, ukuran komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan pemerintah, industri yang mencemari lingkungan	Perusahaan di (ASEAN: Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina) tahun 2018-2020	• Independensi dewan direksi, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan pemerintah tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas <i>sustainability report</i>.

No	Penelitian	Variabel Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
				Industri yang mencemari lingkungan berpengaruh positif signifikan terhadap <i>sustainability report</i>
6.	(Chairina & Tjahjadi, 2023)	Variabel dependen: <i>Sustainability report</i> Variabel independen: Ukuran dewan direksi, proporsi anggota dewan komisaris independen, direktur Perempuan, CSO Variabel moderasi: Komitmen keberlanjutan	Perusahaan di negara ASEAN tahun 2015-2019	- Ukuran dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan pada reliabilitas, tetapi tidak berpengaruh pada kejelasan, keringkasan, dan uji agregat - Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap kejelasan dan keringkasan. - Jumlah direktur perempuan memiliki pengaruh positif dan signifikan pada keringkasan, kejelasan, dan keandalan.

No	Penelitian	Variabel Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
				• CSO memiliki hubungan signifikan terhadap keringkasan • Komite keberlanjutan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keberlanjutan • Komitmen keberlanjutan memoderasi hubungan antara tata kelola perusahaan dengan kualitas informasi dalam laporan keberlanjutan
7.	(Sari et al., 2021)	Variabel dependen: <i>Sustainability report disclosure</i> Variabel independen: Kepemilikan manjerial, dewan komisaris independen, komite audit Variabel moderasi: Profitabilitas	Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 dan 2019	• Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap <i>sustainability report</i> • Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap <i>sustainability report</i> • Komite audit tidak

No	Penelitian	Variabel Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
				berpengaruh terhadap <i>sustainability report</i> • Profitabilitas memoderasi kepemilikan institusional tidak memoderasi dewan komisaris independen dan komite audit terhadap <i>sustainability report</i>
8.	(Sitorus et al., 2024)	Variabel dependen: <i>Sustainability report disclosure</i> Variabel independen: Ukuran perusahaan, dewan direksi, <i>leverage</i> Variabel moderasi: Profitabilitas	Perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020	• Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> • Dewan direksi dan leverage berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> • Profitabilitas tidak memoderasi pengaruh ukuran perusahaan, memoderasi

No	Penelitian	Variabel Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
				pengaruh dewan direksi dan leverage terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i>
9.	(Rana & Yusraini, 2023)	Variabel dependen: Sustainability report Variabel independen: Dewan komisaris, dewan direksi	38 bisnis yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020	• Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap <i>sustainability report</i> • Dewan direksi berpengaruh negatif terhadap <i>sustainability report</i>
10.	(Burhany et al., 2024)	Variabel dependen: <i>Sustainability reporting</i> Variabel independen: Ukuran dewan direksi, dewan independen, CEO Variabel kontrol: Ukuran perusahaan, profitabilitas, pertumbuhan, <i>leverage</i> , dan usia perusahaan	18 perusahaan sektor Minyak dan Gas di Indonesia dan Malaysia tahun 2012-2022	• Ukuran dewan, Dewan independen, Masa jabatan CEO berpengaruh positif terhadap <i>sustainability report quality</i>

2.10. Pengembangan Hipotesis

2.10.1. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Pengungkapan

Sustainability Report

Berdasarkan teori *agency* dewan komisaris independen memiliki peran penting dalam mengawasi tindakan manajemen agar dapat sejalan dengan kepentingan pihak terakut lainnya. Keberadaan komisaris independen mendorong perusahaan untuk bertindak lebih transparan dalam mengelola kegiatan operasional dan informasi-informasi perusahaan. Salah satu informasi yang dapat diungkapkan oleh perusahaan kepada pemangku kepentingan adalah informasi yang terakut dengan *sustainability report*. Semakin tinggi jumlah proporsi dewan komisaris independen semakin besar kesempatan perusahaan mengungkapkan informasi secara lebih lengkap dan terbuka.

Teori ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan Listiani & Fadjar (2025) menunjukkan hasil ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *sustainability report*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani et al. (2024) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap *sustainability report*. Berdasarkan kajian landasan teori serta temuan penelitian terdahulu tersebut, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut.

H1: Ukuran dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *sustainability report*.

2.10.2. Pengaruh Dewan Direksi terhadap *Sustainability Report*

Dewan direksi memiliki peran dalam menentukan sejauh mana perusahaan berkomitmen terhadap *sustainability report*. Berdasarkan teori *legitimacy*, dewan direksi mengarahkan perusahaan untuk melakukan tindakan yang dapat meningkatkan citra positif di mata publik dengan bentuk *sustainability report*. Semakin baik fungsi dan kinerja dewan direksi, semakin tinggi untuk mendapat legitimasi dari masyarakat dan para pemangku kepentingan agar tetap dapat beroperasi dengan baik.

Teori ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani et al. (2024) dan Saraswati et al. (2024) menunjukkan hasil bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap *sustainability report*. Sedangkan, penelitian ini yang dilakukan Hendrati et al. (2023) menunjukkan hasil bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap *sustainability report*. Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang inkonsisten. Maka, peneliti menggunakan landasan teori sebagai dasar menyusun hipotesis sebagai berikut:

H2: Dewan direksi berpengaruh positif terhadap *sustainability report*.

2.10.3. Pengaruh Komite Audit terhadap *Sustainability Report*

Berdasarkan teori *agency* komite audit bertugas memastikan proses pelaporan bahwa informasi yang disajikan manajemen dapat dipercaya serta sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Keberadaan komite audit sebagai mekanisme pengawasan mencerminkan penerapan *corporate governance* yang efektif, yang pada akhirnya berpotensi meningkatkan kinerja operasional serta reputasi

perusahaan. Kondisi ini sejalan dengan teori *legitimacy*, dimana perusahaan menunjukkan pemenuhan tanggung jawab sosial, lingkungan, dan ekonomi melalui penyusunan *sustainability report* sebagai wujud komitmen kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Handayani et al. (2024) menemukan bahwa komite audit memiliki pengaruh positif terhadap *sustainability report*. Namun hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Idawati et al. (2024) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *sustainability report*. Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Komite Audit berpengaruh positif terhadap *sustainability report*.

2.10.4. Pengaruh Profitabilitas terhadap *Sustainability Report*

Profitabilitas perusahaan menjadi salah satu faktor yang berpotensi mempengaruhi luas kualitas pengungkapan *sustainability report*. Berdasarkan teori *legitimacy* perusahaan dengan profitabilitas tinggi berusaha mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan dengan menunjukkan kegiatan operasionalnya tidak hanya berfokus pada laba, tetapi memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini juga didukung oleh teori *agency* yaitu profitabilitas yang tinggi menunjukkan perusahaan mampu memaksimalkan sumber daya yang dimiliki dan dapat mengurangi konflik kepentingan serta asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham melalui pengungkapan informasi yang lengkap dalam bentuk *sustainability report*.

Teori ini didukung oleh penelitian Sitorus et al. (2024) menemukan bahwa profitabilitas mampu memoderasi pengaruh dewan direksi terhadap *sustainability report*. Sebaliknya penelitian yang dilakukan Sari et al. (2021) yang menyatakan profitabilitas tidak berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara dewan komisaris independen dan komite audit terhadap *sustainability report*. Maka, penelitian ini menggunakan landasan teori sebagai dasar menyusun hipotesis sebagai berikut:

H4a: Profitabilitas dapat memoderasi hubungan dewan komisaris independen terhadap *sustainability report*

H4b: Profitabilitas dapat memoderasi hubungan dewan direksi terhadap *sustainability report*

H4c: Profitabilitas dapat memoderasi hubungan komite audit terhadap *sustainability report*